

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Dimana pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2007: 1).

Dewasa ini pajak merupakan sumber dana yang paling diharapkan suatu negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Jika hanya mengandalkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah sekarang tengah giat-giatnya memacu penerimaan negara melalui sektor pajak.

Siahaan (2004: 3) mengungkapkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Di setiap negara yang memiliki pemerintahan dan rakyat akan ada pajak di negara tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir tidak ada negara di dunia yang tidak memberlakukan pajak.

Tiap negara membuat aturan dalam mengenakan dan memungut pajak yang berpedoman pada prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan. Peranan pajak bagi tiap negara pada dasarnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Kemampuan setiap negara untuk memungut pajak juga berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara (Siahaan, 2004: 1)

Sebagai sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Dengan pentingnya fungsi pajak sebagai pembiayaan pembangunan negara, maka kewajiban membayar pajak harus dijalankan oleh wajib pajak.

Akan tetapi hal tersebut tidak selalu berjalan lancar, banyak wajib pajak yang enggan melakukan kewajibannya membayar pajak. Masyarakat masih mengabaikan dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena dirasa memberatkan, dalam proses pembayarannya sering mengalami kesulitan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa dan bagaimana pajak dan bagaimana menghitung serta melaporkannya.

Berdasarkan data-data Kemenkeu yang diungkapkan oleh Agus D. Martowardojo kepada Warta Ekonomi Online, tercatat rata-rata pertumbuhan pendapatan pajak antara 2005 sampai 2010 adalah 16%. Sampai tahun 2011 kinerja pertumbuhannya meningkat menjadi 18,27%. Dan, untuk tahun 2012, sampai akhir semester pertama tingkat pertumbuhannya sudah mencapai 19,48%. Pertumbuhan pendapatan PPN dan PPh BM tumbuh 33%,” dan target pajak pada tahun 2012 adalah Rp 885 triliun. Agus juga mengatakan bahwa, potensi wajib pajak pribadi di Indonesia ada 20 juta. Wajib Pajak badan yang potensial ada 5 juta lembaga, tetapi yang terdaftar baru 1,9 juta Wajib Pajak, dan yang melapor hanya 520 ribu Wajib Pajak (<http://wartaekonomi.co.id/berita4463/menkeu--potensi-pendapatan-pajak-indonesia-memang-luar-biasa.html>, 24 November 2012).

Menurut ekonom Umar Juoro, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum memberikan yang terbaik dalam menunaikan kewajibannya sebagai institusi pemungut pajak, karena rasio pajak di Indonesia masih rendah, yaitu masih pada angka sekitar 12,5 persen. Rasio rendah ini dia bandingkan dengan rasio serupa di negara-negara lain yang disebutnya sudah pada angka paling tidak 15-16 persen. Umar melihat masalah yang sering terjadi sekarang ini adalah rendahnya kesadaran para wajib pajak. "Banyak dari mereka yang mangkir pajak seperti jumlah tagihan pajak Rp 10 juta, tapi yang dibayarkan hanya kurang dari itu. Itu masih sering terjadi," katanya memberi tekanan (<http://www.pajak.go.id/content/umar-juoro-kuncinya-tergantung-pada-wajib-pajak>, 22 januari 2013).

Dunia perpajakan di Indonesia memang sudah banyak mengalami perubahan, tetapi hingga saat ini permasalahan pajak masih saja terus bermunculan. Meskipun pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Haula dan Rasin (2005: 2) mengungkapkan bahwa saat ini ada pemikiran dari segelintir masyarakat untuk tidak membayar pajak. Mereka berpendapat bahwa meskipun sudah membayar pajak, mereka merasa tidak mendapatkan/merasakan *benefit* (manfaat) apapun dari pemerintah. Selain itu penggunaan pajak oleh pemerintah dinilai tidak transparan.

Masih menjadi anggapan dalam masyarakat bahwa pajak merupakan beban sehingga selalu dicari upaya untuk menghindari pajak. Jika wajib pajak enggan membayar pajak maka negara akan rugi. Hal ini membuat mau tidak mau usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus ditingkatkan. Biasanya kesadaran dipengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang suatu permasalahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan pemahaman bagi masyarakat mengapa mereka harus membayar pajak dan apa fungsi penerimaan negara dari sektor pajak (Siahaan, 2004: 2).

Widodo dan Dedy (2008: 1) menyatakan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi warga negara dalam membayar pajak telah dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui iklan visual, media masa maupun layanan penyuluhan. Namun di era informasi ini, dimana begitu luas dan cepatnya cakupan informasi, masyarakat secara selektif hanya memilih informasi yang

mereka inginkan (untuk sebagian orang, informasi tentang pajak mungkin bukan termasuk informasi yang benar-benar mereka inginkan). Akibatnya sering timbul keluhan dalam masyarakat bahwa upaya pemerintah menyebarkan informasi tentang pajak masih sangat kurang, padahal tidak sedikit dana maupun kegiatan yang dialokasikan untuk kepentingan penyebaran informasi tersebut.

Upaya yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan lancar sesuai dengan harapan jika tidak ada kemauan membayar pajak dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010), adapun yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis, adalah (1) Widayati dan Nurlis mengambil lokasi penelitian di KPP Pratama Gambir Tiga, sedangkan lokasi penelitian ini di KPP Pratama Karanganyar, (2) dalam penelitian ini ditambahkan dua variabel independen yaitu kualitas pelayanan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Kualitas pelayanan merupakan pengembangan dari penelitian Setyonugroho (2012) dan tingkat

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum pengembangan dari penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), (3) Widayati dan Nurlis mengambil tahun penelitian 2010, sedangkan penelitian ini tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK, WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA KARANGANYAR)”**.

## **B. Pokok Masalah**

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan tersadap sistem pemerintah dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan acuan dalam menentukan kebijaksanaan di masa mendatang, supaya pembayaran pajak oleh wajib pajak terus meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan Negara.
2. Penelitian ini sebagai penerapan teori yang penulis terima di bangku kuliah untuk dapat diterapkan pada kehidupan nyata.

3. Sebagai salah satu bahan referensi pembandingan bagi penelitian lain yang melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, beberapa penelitian terdahulu, penurunan hipotesis dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variable dan pengukurannya serta metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya.